

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA PADANG TERHADAP PEMELIHARAAN  
SISTEM DRAINASE DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh :



**FARADILA SUSIANTO**

**1910111017**

**Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII)**

**Pembimbing :**

**Syofiarti, S.H., M.Hum,  
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITS ANDALAS**

**PADNG**

**2023**

## ABSTRAK

Drainase merupakan salah satu prasarana yang berperan sebagai pengering dan pengalir air hujan dari suatu wilayah perkotaan, yang meliputi permukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi. Kota Padang sebagai pintu gerbang utama aktivitas ekspor impor menyebabkan berubahnya karakteristik fisik Kota Padang. Dengan banyaknya bangunan yang berdiri dapat mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan yang kemudian menyebabkan banjir. Banjir di Kota Padang sebagian besar terjadi karena tidak mempunya saluran drainase menampung debit air hujan. Pendangkalan saluran akibat sedimentasi yang menumpuk mengakibatkan kapasitas mengalirkan air buangan menjadi berkurang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang? 2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan kuesioner dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Pemeliharaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang belum terlaksana dengan baik melalui perencanaan-perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sistematis. Hal tersebut tampak pada pemantauan penilaian kualitas drainase dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih menunggu laporan dari masyarakat untuk sebelumnya melakukan survey lokasi, bukan dari temuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang secara mandiri. 2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam pemeliharaan sistem drainase Kota Padang terbagi dua yaitu faktor yuridis yakni belum adanya peraturan daerah di kota padang yang mengatur tentang penyelenggaraan drainase dan faktor non yuridis seperti pipa dan kabel yang terpasang di dalam saluran drainase, bangunan liar disepanjang saluran drainase dan perilaku masyarakat yang menutup saluran dan membuang sampah ke saluran drainase.

**Kata Kunci : Kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemeliharaan, Drainase,**

